

## ABSTRAK

**FEBRYASHA HANDAYANI, *Kebijakan Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang 1942-1945 di Pulau Jawa. Karya Ilmiah. Jakarta. Program Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta. 2020.***

Penelitian ini mengenai Kebijakan Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Pendidikan pada masa Pendudukan Jepang yang berbeda dengan Kebijakan pada penjajah sebelumnya, jiwa nasionalisme yang diciptakan Jepang untuk mengambil hati rakyat Indonesia, kebijakan pendidikan yang mendapat pengaruh kemiliteran Jepang untuk mendukung Perang Pasifik. Hingga kebijakan pendidikan ini masih ada yang diterapkan beberapa oleh Indonesia setelah Kemerdekaan Indonesia. Sumber yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada sumber sekunder, berupa buku dan artikel yang berkaitan dengan Kebijakan Pendidikan pada Masa Pendudukan Jepang. Sumber tersebut diperoleh dari Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Perpustakaan Universitas Indonesia, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), serta buku-buku relevan lain yang peneliti peroleh. Penulisan karya ilmiah ini dilakukan menggunakan metode naratif deskriptif dengan mempertimbangkan aspek kronologi sejarah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Pendidikan pada masa Pendudukan Jepang bertujuan untuk mengambil hati Indonesia dan menghapuskan bekas-bekas penjajahan sebelumnya. Setelah Jepang berhasil menyerang Armada Amerika di Pearl Harbour, Hawaii. Jepang mendaratkan pasukannya ke Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur. Setelah Palembang jatuh ke tangan Jepang, terbukalah Pulau Jawa bagi tentara Jepang pada awal bulan Maret 1942. Kedatangan Jepang memberikan kesan yang mendalam bagi Indonesia yang menganggap bahwa kekuasaan Belanda tidak dapat diruntuhkan dan didukung dengan ramalan *Joyoboyo* yang berisi bahwa akhir penjajahan oleh bangsa kulit putih di tangan penyerbu kulit kuning dari utara menjelang kebebasan Indonesia.

Demi mendapatkan hati rakyat Indonesia, Jepang melakukan berbagai kebijakan di bidang politik yaitu melarang kegiatan berkumpul dan rapat, stratifikasi sosial dimana Jepang berada di posisi teratas disusul oleh Timur Asing dan Indonesia pada lapisan kedua dan Belanda serta Eropa pada lapisan ketiga. Dikeluarkannya juga kebijakan mengenai produksi perkebunan, rehabilitasi dan pemberian kredit.

Untuk mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan antara lain : Pengambilan aset-aset pemerintah Hindia Belanda, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat, kebijakan moneter dan perdagangan, sistem ekonomi perang, penggunaan bahasa, menghilangkan budaya barat, perubahan jenis sekolah, masa pendidikan, isi pengajaran

Kata Kunci : *Kebijakan Pendidikan, Pendudukan Jepang*

## ABSTRACT

**FEBRYASHA HANDAYANI, Educational Policy during the Japanese Occupation 1942-1945 on Java Island. Scientific work. Jakarta. Historical Education Study Program. Faculty of Social Sciences, Jakarta State University. 2020**

This study of Educational Policy during the Japanese Occupation aims to find out how the Education Policy during the Japanese Occupation was different from the Policy of the previous occupiers, the spirit of nationalism created by Japan to win the hearts of the people of Indonesia, an educational policy that was influenced by the Japanese military to support the Pacific War. Until this education policy was still implemented by some Indonesians after Indonesian Independence. The sources used in this study focus on secondary sources, in the form of books and articles relating to Education Policy during the Japanese Occupation. The source was obtained from the Jakarta State University Library (UNJ), the University of Indonesia Library, the National Library of the Republic of Indonesia (PNRI), and other relevant books that researchers obtained. Writing scientific papers is done using descriptive narrative method by considering aspects of historical chronology.

The results of this study indicate that the Education Policy during the Japanese Occupation aimed to win the hearts of Indonesia and erase the former colonization. After the Japanese successfully attacked the American Fleet at Pearl Harbor, Hawaii. Japan landed its troops in Indonesia on January 11, 1942 in Tarakan, East Kalimantan. After Palembang fell into Japanese hands, the island of Java opened for the Japanese army in early March 1942. The arrival of Japan gave a deep impression to Indonesia which considered that Dutch power could not be undermined and supported by Joyoboyo's prediction that contained the end of colonialism by the white people in the hands of yellow skin invaders from the north ahead of Indonesian freedom.

For the sake of gaining the hearts of the Indonesian people, Japan pursued various policies in the political field, namely prohibiting gatherings and meetings, social stratification in which Japan was in the top position followed by Foreign East and Indonesia in the second layer and the Netherlands and Europe in the third layer. It also issued policies regarding plantation production, rehabilitation and lending.

Namely to support the strength and needs of the war, the Japanese government adopted a number of policies including: Taking the assets of the Dutch East Indies government, control of plantations and agricultural agriculture, monetary and trade policies, war economic system, use of language, eliminating western culture, changing type of school, education period, teaching content

*Keywords: Educational Policy, Japanese Occupation*